

## **ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN KAWASAN KPHP MODEL POIGAR** (*Perception and Behavior Analysis of Community to the Existence of Poigar PFMU Model*)

Arif Irawan<sup>1</sup>, Iwanuddin<sup>1</sup>, Jafred E. Halawane<sup>1</sup> dan Sulistya Ekawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado  
Jl. Tugu Adipura Raya Kel. Kima Atas Kec. Mapanget Kota Manado, Indonesia.

Email: arif\_net23@yahoo.com; iank\_1979@yahoo.com; jafiehalawane@yahoo.com

<sup>2</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim  
Jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia

Email: sulistya.ekawati@yahoo.co.id

Diterima 20 Februari 2017, direvisi 20 April 2017, disetujui 21 April 2017

### **ABSTRACT**

*Implementation of community empowerment scheme in the Poigar Production Forest Management Unit (PFMU) Model area needs to take into account on community perception and behavior. This study aimed to determine the level of perception and behavior of the community towards the existence Poigar PFMU Model and to recommend the appropriate community empowerment scheme. To find out the perceptios and behavior of the Lolan Village community towards Poigar PFMU Model was by using Likert Scale. Furthermore, to determine the factors that influence people's behavior, then Spearman rank (Rs) correlation test was used. The results showed that the level of perception of Lolan village communities to the existence of the Poigar PFMU Model was in good category, while the society behavior was in the less category. A good public perception of the Poigar PFMU Model area, did not have significant influence on its behavior. Community social characteristics that correlate with the behavior of the community were among others: education, level of income sourced from outside the area and level of interaction with the forest. Based on this, community empowerment strategy that is most likely to do in Poigar PFMU Model is through the Forestry Partnership Scheme.*

*Keywords: PFMU Model Poigar; perception; behavior; empowerment.*

### **ABSTRAK**

Penerapan skema pemberdayaan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar perlu memerhatikan persepsi dan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar serta merekomendasikan skema pemberdayaan masyarakat yang sesuai. Untuk dapat mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat Desa Lolan terhadap kawasan KPHP Model Poigar digunakan Skala *Likert*. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat digunakan uji korelasi *Rank Spearman (Rs)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat Desa Lolan terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar adalah pada kategori baik, sedangkan perilaku masyarakat berada pada kategori rendah. Persepsi masyarakat yang baik terhadap kawasan KPHP Model Poigar tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perilakunya. Karakteristik sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat adalah pendidikan, tingkat pendapatan yang bersumber dari luar kawasan dan tingkat interaksi dengan hutan. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi skema pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di kawasan KPHP Model Poigar saat ini adalah melalui skema Kemitraan Kehutanan.

Kata kunci: KPHP Model Poigar; persepsi; perilaku; pemberdayaan

## I. PENDAHULUAN

Konflik penguasaan lahan merupakan masalah nyata dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Kartodihardjo, Nugroho, & Putro (2011) menyatakan bahwa konflik berupa tumpang tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat/lokal, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan diperkirakan seluas 17,6 juta sampai dengan 24,4 juta ha. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu diantara upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. KPH merupakan sistem pengelolaan hutan yang dapat menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam hubungannya antara hutan dengan masyarakat, isu akses masyarakat menjadi satu aspek yang penting dan perlu perhatian besar. Ruhimat (2010) menyatakan bahwa optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan memegang prinsip bahwa setiap kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memerhatikan sifat, karakteristik dan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Alviya, Salminah, Arifanti, Maryani, & Syahadat (2012) menyatakan bahwa tantangan utama dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan hutan adalah menyelaraskan antara kebutuhan berbagai kalangan khususnya masyarakat lokal dengan kepentingan kelestarian hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar merupakan KPH di Sulawesi Utara yang terletak pada lintas 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 788/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dinyatakan bahwa luas keseluruhan kawasan KPHP Model Poigar adalah ±41.598 ha yang terbagi menjadi Hutan Produksi (HP)/Hutan Produksi

Terbatas (HPT) seluas 36.332 ha (87,34 %), kawasan Hutan Lindung (HL) termasuk hutan bakau di sebagian pesisir pantai seluas 5.265 ha (12,66 %). Intensitas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan KPHP Model Poigar diketahui sangatlah tinggi. Sebagian besar kawasan KPHP Model Poigar telah diklaim dan diolah masyarakat menjadi kebun kelapa, cengkeh, jagung dan jenis tanaman perkebunan lainnya. Tujuan dari pembentukan KPHP Model Poigar salah satunya adalah dapat menjadi solusi dari konflik tenurial yang terjadi di kawasan ini.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang banyak digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik penguasaan lahan. Mulyadi (2013) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat dalam posisi pelaku sekaligus sebagai penerima manfaat dari proses mencari solusi. Penerapan suatu skema pemberdayaan masyarakat dalam sebuah wilayah perlu memerhatikan karakter masyarakat yang terdapat pada daerah tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan hutan yang ada di sekitarnya. Wulandari (2010) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang memberikan kesadaran kepada individu tentang suatu obyek atau peristiwa di luar dirinya melalui panca indra. Sedangkan menurut Surati (2014) perilaku merupakan perbuatan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Variabel persepsi dan perilaku masyarakat perlu diketahui sebagai pedoman dalam menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat yang efektif serta diharapkan mampu menjadi alat pengurai konflik yang terjadi di kawasan KPHP Model Poigar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar serta merekomendasikan skema pemberdayaan masyarakat yang sesuai.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dalam mengurai konflik tenurial yang terjadi di kawasan KPHP Model Poigar.

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2016 pada salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan KPHP Model Poigar, yaitu Desa Lolan.

alat-alat analisis kuantitatif yang berupa analisis statistika (deskriptif, parametrik, dan nonparametrik)maupundengan menggunakan perhitungan matematika (Mardikanto, 2006). Untuk dapat mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat Desa Lolan terhadap kawasan KPHP Model Poigar digunakan skala *Likert*. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kategori persepsi dan perilaku masyarakat ditampilkan pada Tabel 1.

Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat digunakan uji korelasi *Rank Spearman (Rs)*.

Tabel 1. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui kategori persepsi dan perilaku masyarakat  
 Table 1. The criteria used to determine the categories of perception and behavior

No	Variabel ( <i>Variable</i> )	Kategori ( <i>Category</i> )
1.	Persepsi terhadap kawasan KPHP Model Poigar ( <i>Perception toward Poigar PFMU Model</i> )	Rendah ( <i>Low</i> ) (<2) Sedang ( <i>Medium</i> ) (3-4) Tinggi ( <i>Height</i> ) (>5)
2.	Perilaku terhadap kawasan KPHP Model Poigar ( <i>Behavior toward Poigar PFMU Model</i> )	Rendah ( <i>Low</i> ) (<2) Sedang ( <i>Medium</i> ) (3-4) Tinggi ( <i>Height</i> ) (>5)

Sumber (*Source*): Surati (2015) dimodifikasi

**B. Pengumpulan Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lolan yang memiliki aktivitas dalam kawasan KPHP Model Poigar. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* dengan memilih 30 responden. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara dengan alat bantu kuesioner, studi pustaka dan dokumentasi.

**C. Analisis Data**

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang memusatkan pada pengumpulan data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

KPHP Model Poigar merupakan sebuah organisasi pengelola hutan pada tingkat tapak setingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar wilayah kelola KPHP Model Poigar adalah kawasan hutan bekas perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Tembaru Budi Pratama. Perusahaan ini pernah beroperasi di wilayah Sulawesi Utara pada tahun 80-an hingga awal tahun 2000. Dalam kurun waktu tersebut permasalahan okupasi masyarakat terhadap wilayah konsesi perusahaan berulang kali terjadi, namun intensitasnya tergolong masih rendah. Peningkatan intensitas pembukaan lahan oleh masyarakat semakin tinggi saat

izin pengelolaan kawasan hutan yang dimiliki PT Tembaru Budi Pratama dicabut oleh pemerintah. Pengawasan yang rendah serta penegakan hukum yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan tingkat okupasi lahan semakin tidak terkendali. Irawan, Mairi, & Ekawati (2016) menyatakan bahwa jumlah luasan penguasaan lahan oleh masyarakat pada wilayah KPHP Model Poigar sangat tinggi dimana dari total keseluruhan wilayah KPHP Model Poigar, hanya terdapat sekitar 30% yang masih steril, sedangkan 70% sisanya telah diklaim oleh masyarakat.

Tingginya tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat sebanding dengan luas lahan yang terdeforestasi di kawasan KPHP Model Poigar. Ahmad, Saleh, & Rusilono (2016) menyatakan bahwa tekanan areal hutan di KPHP Model Poigar sangat besar, hal ini ditandai dengan angka deforestasi yang terjadi pada periode 2000 sampai 2013 adalah cukup besar yaitu sekitar 12.668,2 ha atau 30,45 % dari total luas kawasan hutan KPHP Model Poigar yang menyebar pada seluruh kawasan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyebab deforestasi yang terjadi di KPHP Poigar meliputi lima faktor, yakni: jarak areal hutan dengan jaringan jalan dan sungai, pengaruh kemiringan lereng, ketinggian tempat dan terakhir adalah faktor tekanan penduduk yang bermukim di sekitar kawasan KPHP Model Poigar.

Desa Lolan merupakan salah satu desa yang memiliki jarak terdekat serta akses termudah terhadap kawasan KPHP Model Poigar. Akses jalan telah dibangun untuk kebun masyarakat yang berada pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Bentuk tutupan lahan pada kawasan KPHP Model Poigar yang berbatasan dengan Desa Lolan didominasi oleh perkebunan dan semak belukar. Pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa bentuk tutupan lahan pada kawasan KPHP Model Poigar adalah areal perkebunan, semak dan tanah terbuka dengan perkebunan monokultur merupakan tipe perkebunan yang paling

mendominasi. Lahan semak belukar biasanya terbentuk dari hasil pengolahan lahan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Lolan dan telah ditinggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Semak belukar juga merupakan penanda yang digunakan masyarakat dari bentuk penguasaan lahan yang telah dilakukan.

## **B. Persepsi & Perilaku Masyarakat Terhadap Kawasan KPHP Model Poigar**

Karakteristik sosial masyarakat merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan. Penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan hutan diantaranya adalah karena kurangnya perhatian terhadap faktor tersebut. Strategi pemberdayaan masyarakat yang selama ini lebih banyak bersifat *top down* perlu menjadi pelajaran berharga untuk tidak terulang kembali. Golar (2014) menyatakan bahwa strategi *bottom up* yang mengakomodir peran serta masyarakat perlu diaplikasikan dalam konteks pengelolaan hutan lestari.

Persepsi dan perilaku seseorang adalah bentuk karakteristik sosial yang banyak dipertimbangkan untuk mengelola kawasan hutan berbasis masyarakat. Mamuko, Walangitan, & Tilaar (2016) menyatakan bahwa keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor teknis, kelembagaan maupun faktor sosial ekonomi masyarakat. Dari aspek teknis, kendala yang dihadapi diantaranya adalah kondisi iklim, tanah dan aspek ekologis lainnya, sedangkan dari aspek kelembagaan sering diperhadapkan pada hambatan pelaksanaan kegiatan karena mengikuti prosedur keproyekan. Dari aspek sosial ekonomi keberhasilan program dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku sebagai faktor yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi dan perilaku masyarakat Desa Lolan dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2.



Tabel 2. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kawasan KPHP Model Poigar

Table 2. The indicators used to determine the perception and behavior of society towards the Poigar PFMU Model

No	Variabel ( <i>Variable</i> )	Indikator ( <i>Indicator</i> )
1.	Persepsi masyarakat ( <i>Communities' perception</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang kawasan KPHP Model Poigar</li> <li>2. Pengetahuan tentang kegiatan pengelolaan lahan/berkebun dalam kawasan</li> <li>3. Pengetahuan tentang kegiatan <i>illegal logging</i> dalam kawasan</li> <li>4. Pengetahuan tentang kegiatan pertambangan dalam kawasan</li> <li>5. Pengetahuan tentang pengaruh kawasan hutan terhadap keberadaan sumber air</li> <li>6. Pengetahuan tentang pengaruh kawasan hutan terhadap bencana alam</li> </ol>
2.	Perilaku masyarakat ( <i>Communities' behavior</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengolahan lahan dalam kawasan hutan berkaitan dengan sumber air</li> <li>2. Kegiatan pengolahan lahan dalam kawasan hutan berkaitan topografi/kelerengan</li> <li>3. Kegiatan penanaman pohon yang pernah dilakukan</li> <li>4. Kegiatan jual beli lahan dalam kawasan</li> <li>5. Kegiatan membakar untuk kepentingan membuka lahan</li> <li>6. Kegiatan mengambil kayu dalam kawasan hutan</li> </ol>

Sumber (*Source*): Surati (2015) & Umar (2009) dimodifikasi

Persepsi masyarakat Desa Lolan terhadap kawasan KPHP Model Poigar dapat diketahui dari sejauh mana tingkat pengetahuan tentang hutan dan fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka. Berdasarkan hasil rekapitulasi data dapat diketahui bahwa secara umum tingkat persepsi masyarakat Desa Lolan terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar adalah pada kategori baik. Jika dirinci lebih lanjut dari seluruh responden diketahui bahwa 70% responden berada pada tingkat persepsi baik, sedangkan 30% berada pada tingkat persepsi sedang. Sebagian besar responden menyatakan bahwa hutan mampu berpengaruh terhadap kondisi lingkungan serta mampu mencegah terjadinya bencana alam. Masyarakat Desa Lolan beranggapan bahwa rusaknya hutan akan berakibat terhadap ketidakseimbangan kondisi alam yang selanjutnya akan berpengaruh pada kebutuhan masyarakat secara langsung, misalnya dalam hal ketersediaan sumber air. Kegiatan-kegiatan seperti pembukaan lahan

dalam kawasan hutan, penebangan kayu secara *illegal*, dan kegiatan pertambangan juga merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh pandangan masyarakat. Damanik, Affandi, & Asmono (2014) menyatakan bahwa persepsi masyarakat akan baik apabila masyarakat memahami dengan baik bahwa dirinya bergantung hidup dari sumber daya hayati hutan dan menginginkan agar sumber daya tersebut dikelola secara lestari.

Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa persepsi yang baik dimiliki oleh masyarakat terhadap keberadaan hutan yang terdapat di sekitarnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain Mamuko *et al.* (2016) menyampaikan bahwa persepsi responden terhadap hutan dan fungsinya berada pada persepsi tinggi (48%), sedang (45,1%) dan persepsi rendah (6,9%). Damanik *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo tergolong pada persepsi

baik. Selanjutnya Narsuka, Sujali, & Setiawan (2009) juga menyatakan bahwa tingkat persepsi masyarakat mengenai pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), yang dirinci dalam tiga isu utama: mengenai status dan manfaat, kondisi TNGM dan pengelolaan TNGM diketahui berada dalam kategori sedang atau cukup positif (74,2%). Selain itu Bisjoe dan Muin (2015) juga menyatakan bahwa masyarakat di Hutan Desa Kabupaten Bantaeng memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat hutan, dan Yuzen, Siregar, & Saam (2014) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 87,5% adalah cukup baik, baik dan sangat baik, sedangkan yang memiliki persepsi tidak baik dan kurang baik hanya 12,5%.

Selanjutnya parameter yang digunakan untuk mengukur perilaku masyarakat dititikberatkan pada aktivitas yang biasanya masyarakat lakukan terhadap kawasan hutan. Suryaningsih, Purnaweni, & Izzati (2012) menyatakan bahwa perilaku masyarakat berkaitan dengan aspek ekologi diantaranya menanam dan memelihara pohon, memanen hasil hutan, serta tidak melakukan kegiatan yang merusak hutan seperti mengambil satwa, menebang pohon sembarangan dan membakar di kawasan hutan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dapat diketahui bahwa perilaku masyarakat Desa Lolan terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori sedang (6,7%) dan kategori rendah (93,3%). Sebagian besar masyarakat telah membuka lahan dalam kawasan KPHP Model Poigar untuk kepentingan perkebunan sejak lama dengan sistem tebas bakar. Walaupun responden pada prinsipnya mengetahui manfaat dan fungsi hutan namun kegiatan pemulihan kembali terhadap hutan yang telah dibuka/diolah melalui kegiatan penanaman jenis tanaman kayu masih sangat minim dilakukan oleh masyarakat. Lokasi pembukaan lahan juga tidak mempertimbangkan kondisi topografi maupun jarak dengan sungai ataupun sumber air. Kegiatan *illegal logging*

oleh masyarakat masih sering terjadi namun dengan intensitas yang semakin kecil mengingat lokasi pengambilan kayu sudah semakin jauh dari perkampungan. Safitri (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku masyarakat tentang kelestarian hutan di Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kriteria kurang baik dalam menjaga kelestarian. Umar (2009) juga menyampaikan bahwa masyarakat cenderung mempunyai perilaku akan melakukan tindakan yang bisa mengganggu kelestarian hutan bilamana hutan tidak memberi manfaat bagi kehidupan mereka dan salah satunya adalah perilaku untuk membakar hutan.

### C. Hubungan Tingkat Persepsi terhadap Perilaku Masyarakat

Persepsi dan perilaku merupakan dua variabel yang pada dasarnya memiliki hubungan yang kuat. Masria, Golar, & Ihsan, (2015) menyatakan bahwa persepsi yang benar terhadap suatu objek diperlukan, sebab persepsi merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku. Persepsi masyarakat tentang hutan yang beragam, akan mewarnai sikap masyarakat yang beragam pula terhadap keberadaan hutan, dan akan membentuk perilaku masyarakat dalam memandang keberadaan hutan. Masyarakat yang menyatakan bahwa hutan berfungsi sebagai sumber kehidupan manusia, biasanya cenderung berperilaku eksploitatif terhadap hutan. Seperti yang diungkapkan Irnawati, (2015) bahwa masyarakat yang memiliki persepsi hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian memiliki perilaku cenderung melakukan aktivitas berladang, berburu dan meramu di kawasan Taman Wisata Alam Bariat.

Berdasarkan hasil perhitungan hubungan variabel persepsi dan perilaku dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar -0,019 dengan nilai signifikansi adalah 0,919. Hasil analisis tersebut menggambarkan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata antara

persepsi yang dimiliki masyarakat dengan perilakunya terhadap keberadaan kawasan KPHP Model Poigar. Persepsi yang baik terhadap keberadaan hutan tidak menjamin terjadinya perilaku yang positif. Masria *et al.* (2015) juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala terhadap hutan di sekitar wilayah Desa Labuan Toposo tergolong baik, namun sekalipun persepsi masyarakat baik terhadap hutan tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya negatif.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hasil tersebut, salah satunya adalah terkait pemahaman terhadap batas hutan yang dimiliki masyarakat. Menurut sebagian masyarakat Desa Lolan pengertian hutan adalah kawasan yang masih memiliki tutupan vegetasi rapat yang saat ini lokasinya sudah berada jauh dari perkampungan, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut secara sepihak masyarakat beranggapan bahwa perilaku yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar dan dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa melanggar aturan dan mengganggu kondisi lingkungan. Dampak lain dari pemahaman tersebut secara *de facto* kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sejak lama, saat ini telah menjadi kawasan yang diklaim dan diolah masyarakat. Permasalahan batas kawasan hutan merupakan permasalahan klasik dalam pengelolaan hutan khususnya yang berada di luar pulau Jawa. Batas yang belum jelas sejak dahulu telah menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan. Hal ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Jawa, batas kawasan lebih jelas terutama pada kawasan-kawasan yang dikelola oleh Perhutani. Seperti yang diungkapkan Ngabiyanto (2004) bahwa lahan hutan pasca penjarahan yang telah berubah menjadi lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar tetap dipandang masyarakat milik Perhutani. Tidak terdapat persepsi masyarakat yang

menganggap bahwa lahan hutan tersebut menjadi milik masyarakat desa sekitar hutan. Selain hal tersebut, sebagian masyarakat yang telah memahami batas kawasan juga berdalih terdesak oleh kebutuhan ekonomi, sehingga meskipun persepsi yang dimiliki baik namun perilakunya bersifat sebaliknya. Masria *et al.* (2015) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan yang tergolong baik tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya dapat bersifat negatif. Banyak faktor yang memengaruhi terutama kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara sesaat.

#### **D. Hubungan Aspek Karakteristik Responden dengan Persepsi dan Perilaku**

Terbentuknya persepsi dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kondisi sosial ekonomi setiap individu memiliki arah hubungan yang linier terhadap persepsi dan perilaku seseorang. Mamuko *et al.* (2016) menyatakan bahwa faktor pendidikan yang merupakan salah satu faktor sosial ekonomi memengaruhi persepsi terhadap hutan dan fungsinya, persepsi terhadap program rehabilitasi hutan dan lahan, serta tingkat partisipasi. Selanjutnya Masria *et al.* (2015) menyatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi tingkat persepsi yaitu tingkat pendidikan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan. Garnadi (2004) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang diduga memengaruhi perilaku masyarakat yang terwujud dalam sikap dan tindakan masyarakat sekitar hutan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, tingkat pendapatan, lama tinggal, tingkat interaksi, tingkat pendidikan, tingkat penguasaan lahan pertanian dan tingkat interaksi dengan hutan. Faktor eksternal meliputi tingkat interaksi dengan petugas dan keanggotaan dalam kelompok tani. Wulandari (2010) juga menyatakan bahwa faktor pendidikan dan jumlah pelatihan serta luas lahan merupakan faktor-faktor yang

berpengaruh sangat nyata terhadap persepsi masyarakat.

Data hasil analisis untuk mengetahui beberapa karakteristik masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap tingkat persepsi dan perilaku masyarakat terhadap kawasan KPHP Model Poigar ditampilkan pada Tabel 3.

pendidikan formal berhubungan dengan pembentukan pola pikir untuk menerima hal-hal logis dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap masyarakat Desa Lolan dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan berimplikasi nyata terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya Narsuka *et al.* (2009)

Tabel 3. Hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan persepsi dan perilaku masyarakat  
 Table 3. Socio economic characteristics relationship with perception and behavior society

Karakteristik responden ( <i>Characteristics of respondents</i> )	Koef. korelasi ( <i>Coef. correlation</i> )	
	Persepsi ( <i>Perception</i> )	Perilaku ( <i>Behavior</i> )
Umur ( <i>Age</i> )	0,272	-0,040
Pendidikan ( <i>Level of education</i> )	0,139	0,415*
Tingkat pendapatan bersumber dari dalam kawasan ( <i>The level of income derived from the forest area</i> )	0,117	0,112
Tingkat pendapatan bersumber dari luar kawasan ( <i>The level of income sourced from outside the forest area</i> )	0,151	0,447*
Luas lahan yang dimiliki di dalam kawasan ( <i>Land held in state forests</i> )	-0,104	0,166
Luas lahan yang dimiliki di luar kawasan ( <i>Land held outside the forest area</i> )	0,018	0,319
Tingkat interaksi dengan hutan ( <i>Level of interaction with forest</i> )	0,224	-0,384*
Tingkat interaksi dengan petugas ( <i>Level of interaction with Officers</i> )	-0,085	0,012

Keterangan (*Remarks*):

\*korelasi signifikan pada  $\alpha = 0,01$ ; \*\*korelasi signifikan pada  $\alpha = 0,05$

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat persepsi masyarakat tidak dipengaruhi oleh karakteristik responden yang diamati. Sedangkan untuk perilaku masyarakat, karakteristik yang memberikan pengaruh nyata antara lain; faktor pendidikan, tingkat pendapatan yang bersumber dari luar kawasan dan tingkat interaksi dengan hutan.

Tingkat pendidikan seseorang memiliki korelasi positif terhadap perilakunya terhadap hutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik perilakunya, Shrestha & Alavalapati (2006) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki korelasi positif dengan perilaku konservasi masyarakat. Akudugu, Guo, & Dadzie, (2012) juga menyatakan bahwa pengaruh positif lamanya

menyatakan bahwa tingkat pengetahuan memiliki korelasi positif dengan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan KPHP Model Poigar oleh pihak pengelola perlu terus ditingkatkan kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat sekitar kawasan juga perlu terus dilakukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap perilaku masyarakat.

Tingkat interaksi masyarakat dengan hutan juga merupakan faktor karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang memberikan pengaruh secara nyata. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa semakin tinggi interaksi masyarakat terhadap hutan maka semakin buruk perilakunya. Interaksi masyarakat



yang tinggi terhadap hutan mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap keberadaan hutan. Umar (2009) menyatakan bahwa frekuensi interaksi masyarakat dalam beraktivitas terkait dengan hutan merupakan aspek penting di dalam pengelolaan hutan. Tingkat interaksi masyarakat yang tinggi terhadap kawasan hutan dapat menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan masyarakat yang bersumber dari luar kawasan juga memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat yang diperoleh dari luar kawasan hutan diketahui akan berimplikasi terhadap perilaku yang semakin baik. Surati (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, perilakunya terhadap hutan akan semakin bertambah/positif karena dengan pendapatan yang lebih tinggi maka seseorang akan lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi termasuk informasi tentang hutan dan pengelolaannya. Adanya pendapatan masyarakat yang bersumber dari luar kawasan hutan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pengelolaan lahan dalam kawasan hutan serta akan memberikan pengaruh terhadap kurangnya intensitas interaksi masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang dapat berpotensi pada kerusakan dan deforestasi.

#### **E. Bentuk Pemberdayaan yang Sesuai Bagi Masyarakat**

Tingkat persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keberadaan hutan merupakan informasi penting yang dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Surati (2014) menyatakan bahwa sikap dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Penelitian Parung Panjang adalah bersifat positif, sehingga berimplikasi terhadap strategi pengelolaan hutan. Sistem pengelolaan

partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai petani penggarap melalui program tumpangsari merupakan rekomendasi skema pemberdayaan masyarakat yang tepat. Pengetahuan tentang persepsi dan perilaku masyarakat serta latar belakang mengenai tingkat pendidikan, pendapatan yang diperoleh masyarakat, dan tingkat interaksi dengan kawasan hutan merupakan hal sangat penting dalam rangka merumuskan sistem dan kebijakan pengelolaan lanskap hutan yang mengakomodir kebutuhan para pihak, sehingga terwujud pengelolaan hutan yang lestari. Tingkat persepsi yang baik terhadap hutan oleh masyarakat desa sekitar kawasan KPHP Model Poigar merupakan poin berharga. Narsuka *et al.* (2009) menyatakan bahwa persepsi masyarakat yang positif terhadap pengelolaan hutan merupakan faktor penting dalam pengelolaan kemitraan atau kolaboratif. Irawan *et al.* (2016) menyatakan bahwa masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Poigar pada umumnya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar. Lebih lanjut disampaikan juga bahwa kisaran pendapatan masyarakat desa sekitar KPHP Model Poigar adalah Rp300.000-Rp3.000.000, dengan rata-rata hasil pendapatan masyarakat adalah sebesar Rp1.235.000/bulan. Masyarakat desa sekitar kawasan KPHP Model Poigar juga diketahui memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap kawasan KPHP Model Poigar. Masyarakat Desa Lolan diketahui paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu melakukan interaksi dengan kawasan hutan.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan telah diupayakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam skema pemberdayaan masyarakat adalah melalui skema Kemitraan Kehutanan. Bentuk kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.39/Menhut-II/2013 yang menyatakan bahwa

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Secara lebih luas pola kemitraan juga dapat diartikan sebagai sebuah skema untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas kerja (Zain, Soeaidy, & Mindarti, 2011). Berdasarkan latar belakang tingkat persepsi, tingkat pendapatan serta tingkat interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan, maka skema ini adalah skema yang paling tepat dilakukan oleh pengelola KPHP Model Poigar saat ini. Walaupun skema ini sebenarnya bukanlah merupakan skema pemberdayaan masyarakat yang ideal, namun skema Kemitraan Kehutanan merupakan skema yang paling memungkinkan dapat dilaksanakan oleh KPHP Model Poigar. Kemitraan Kehutanan merupakan skema pemberdayaan masyarakat dimana KPH memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan pelaksanaannya pada bagian hutan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah tertentu dalam Rencana Pengelolaan KPH (Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013). Bakhtiar, Sanyoto, Berliani, Suwito, & Hardiyanto (2015) menyatakan bahwa meskipun dapat memberikan kepastian atas perolehan manfaat dari pengelolaan hutan, skema Kemitraan Kehutanan bukan merupakan bentuk penguasaan lahan, seperti yang dituntut oleh beberapa kalangan masyarakat, lebih lanjut dinyatakan bahwa untuk menyelesaikan berbagai konflik tenurial, lebih baik jika dikembangkan skema-skema seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang digunakan sebagai alternatif dan selanjutnya untuk dikembangkan sebagai jalan tengah sengketa penguasaan lahan.

Skenario kemitraan antara KPHP Model Poigar dan masyarakat dilakukan dengan prinsip pengelolaan hutan dilakukan oleh KPHP dan bekerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan untuk memanfaatkan dan melindungi sumber daya hutan. KPHP Model Poigar dapat menjalin kerja sama dengan kelompok atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Kerja sama ini meliputi kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dalam jangka waktu tertentu. Konsep yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan melakukan pembagian hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Konsep bagi hasil dapat diterapkan pada jenis komoditas kayu maupun non kayu. Hasil dari kegiatan penanaman yang telah dilakukan dapat dipanen oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Proporsi bagi hasil pada umumnya lebih besar yang akan diperoleh masyarakat dibandingkan pihak KPHP Model Poigar. Ilham, Purnomo, & Nugroho (2016) menyatakan bahwa proporsi bagi hasil yang diperoleh oleh masyarakat dari pola kemitraan dalam pengelolaan KPHL Solok adalah 75% untuk masyarakat dan 25% untuk pihak KPHL. Selanjutnya Mukarom *et al.* (2015) juga menyampaikan bahwa sistem bagi hasil yang disepakati dalam kemitraan di KPHL Rinjani Barat tergantung dari jenis yang dihasilkan, untuk jenis hasil hutan kayu (HHK) pembagian hasil yang disepakati adalah 25% untuk KPH (negara) dan 75% koperasi (masyarakat), sedangkan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tanaman produktif bawah tegakan adalah 10% untuk pihak KPH (negara) dan 90% untuk pihak koperasi (masyarakat). Ilham *et al.* (2016) menyatakan bahwa skenario Kemitraan Kehutanan dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan diakui secara legal. Sementara itu, kepastian hukum atas kawasan hutan juga mendapat legitimasi dari masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat yang baik terhadap kawasan KPHP Model Poigar tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perilaku masyarakat. Beberapa karakteristik sosial masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat adalah pendidikan, tingkat pendapatan yang bersumber dari luar kawasan dan tingkat interaksi dengan hutan. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan KPHP Model Poigar saat ini adalah melalui skema Kemitraan Kehutanan.

### B. Saran

Perlu peningkatan pendidikan, peningkatan pendapatan masyarakat dari luar kawasan hutan dan memberikan legalitas agar interaksi masyarakat dengan kawasan KPHP Model dapat lestari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala KPHP Model Poigar beserta staf, serta kepada Moody C. Karundeng, Rinna Mamonto dan Melkianus S Diwi (Teknisi BP2LHK Manado) yang telah banyak memberikan bantuan selama pelaksanaan kegiatan penelitian ini hingga selesainya penulisan naskah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Saleh, M. B., & Rusilono, T. (2016). Model spasial deforestasi di KPHP Poigar, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 5(2), 159–169.
- Akudugu, M. A., Guo, E., & Dadzie, S. K. (2012). Adaption of modern agriculture production technologies by farm households in Ghana. What factors influence their decisions. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 2(3), 1–13.
- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V. B., Maryani, R., & Syahadat, E. (2012). Persepsi para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan lanskap hutan di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171–184.

- Bakhtiar, I., Sanyoto, R., Berliani, H., Suwito, & Hardiyanto, G. (2015). *Upaya KPH mengurai sengketa*. Jakarta : Kemitraan Partnership.
- Bisjoe, A.R., & Muin, N. (2015). Persepsi dan harapan masyarakat terhadap REDD di Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. *Info Teknis Eboni*, 12(1), 13–21.
- Damanik, R. N., Affandi, O., & Asmono, L. P. (2014). Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumber daya hutan (Studi kasus Tahura Bukit Barisan, Kawasan Hutan Sibayak II, Kabupaten Karo). *Peronema Forestry Science Journal*, 3(2), 1–9.
- Garnadi, D. (2004). *Pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan (Kasus di Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten, Kabupaten Majalengka)*. (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Golar. (2014). Resolusi konflik dan pemberdayaan komunitas peladang di TNL. *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi pengelolaan hutan berbasis ekosistem daerah aliran sungai*. Makassar: UNHAS & Komhindo.
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2016). Analisis pemangku kepentingan dan jaringan sosial menuju pengelolaan multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114–119.
- Irawan, I., Mairi, K., & Ekawati, S. (2016). Analisis konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian*, 3(2), 79–80.
- Irnawati. (2015). Perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan Taman Wisata Alam Bariat sebagai daerah resapan air. *Jurnal Agroforestri*, X(3), 181–190.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta: Debut Wahana Sinergi.
- Mamuko, F., Walangitan, H., & Tilaar, W. (2016). Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Eugenia*, 22(2), 80–91.
- Mardikanto. (2006). *Prosedur penelitian: untuk kegiatan penyuluhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Surakarta: Prima Theresia Pressindo.
- Masria, Golar, & Ihsan, M. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Kabuan Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, 3(2), 57–64.
- Mukarom, M., Yuwono, T. G., Sirajuddin, Suryodinoto, ... & Yumantoko. (2015). *Memberdayakan masyarakat melalui kemitraan kehutanan kompilasi tulisan pengalaman dari KPH Rinjani Barat*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*,

- 10(4), 224–234.
- Narsuka, D. R., Sujali, & Setiawan, B. (2009). Persepsi dan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan TNGM. *Majalah Geografi Indonesia*, 23(2), 90–108.
- Ngabiyanto. (2004). Persepsi dan sikap masyarakat desa hutan terhadap lahan hutan pascapenjarahan di Kabupaten Blora. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 2(2), 153–62.
- Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 169–178.
- Safitri, D. F. (2014). *Perilaku masyarakat tentang eksistensi hutan di Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota* (Skripsi). Padang: STKIP PGRI.
- Shrestha, R. K., & Alavalapati, J. R. R. (2006). Linking conservation and development: An analysis of local people's attitude towards Koshi Tappu Wildlife Reserve, Nepal. *Environment, Development and Sustainability*, 8(1), 69–84.
- Surati. (2014). Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 339–347.
- Suryaningsih, W. H., Purnaweni, H., & Izzati, M. (2012). Persepsi dan perilaku masyarakat dalam upaya pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ekosains*, IV(3), 27–38.
- Umar. (2009). *Persepsi dan perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air (Studi kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang)* (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro,.
- Wulandari, C. (2010). Studi persepsi masyarakat tentang pengelolaan lanskap agroforestri di sekitar Sub DAS Way Besai, Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 15(3), 137–140.
- Yuzen, N., Siregar, Y. I., & Saam, Z. (2014). Hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat Kabupaten Kerinci pada Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(2), 197–213.
- Zain, M. R. N., Soeaidy, S., & Mindarti, L. (2011). Kemitraan antara KPH Perhutani dan LMDH dalam menjaga kelestarian hutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 210–216.